

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, AKUNTABILITAS PUBLIK, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, PARTISIPASI ANGGARAN DAN
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
PEMERINTAH**

(Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Bantul)

Hanna Hakim Sunny

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

hannahakim56@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of organizational commitment, public accountability, internal control system of government, participation budget and budget goal clarity on managerial performance of Bantul Regency. This study used purposive sampling to determine the sample that will be used. The data used are primary data, collected by using questionnaires with 80 total sample. The analysis that used in this study are multiple linear regression with 17.0.

The results of this study indicate that organizational commitment, and the budget goal clarity have a positive significant effect on managerial performance. however, human resources public accountability, internal control system of government, and participation budget have no effect on performance of managerial budgeting

Keywords: Organizational Commitment, Public Accountability, Internal Control System Of Government, Participation Budget, The Budget Goal Clarity, Managerial Performance.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi serta UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat melalui DPRD. Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola berbagai hal dalam daerahnya sendiri, termasuk dalam penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPRD. Anggaran

ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai tujuan otonomi daerah yang nyata, bertanggung jawab, dan luas. Sumber dana APBD berasal dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah, dana darurat dan lain-lain.

Dikutip dari (Jakarta, Boediarso Teguh Widodo 2017) menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2017 dana transfer daerah dan dan desa mencapai Rp 765 triliun, atau lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja Kementrian/Lembaga (K/L) yang hanya sekitar Rp 764 triliun. Anggaran transfer dan dana desa terus mengalami peningkatan, bahkan saat ini 9 kali lipat kenaikannya, bahkan melampaui anggaran K/L, dalam 2 tahun ini transfer daerah sudah melebihi dari belanja K/L. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Fokus utama adanya peningkatan anggaran ini adalah pemerataan keuangan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pada akhirnya akan membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan pelaksanaan pelayanan yang baik dan akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Anggaran dalam pemerintah harusnya dianggarkan berdasarkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang baik, hal ini dapat tercapai dengan adanya dukungan peran manajerial dari pegawai terkait. Kinerja didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja SKPD menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah, sedangkan baik buruknya kinerja SKPD tergantung pada kemampuan manajer dalam melaksanakan program yang di anggarkan guna pencapaian tujuan pemerintah. Hal ini dikarenakan fungsi SKPD sebagai dasar perencanaan, pengendalian anggaran dan penilaian kinerja pemerintah daerah pada unit yang bersangkutan. Oleh karena itu, SKPD dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dituntut untuk mempunyai kinerja positif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dikutip dari (Bantul, Setiya 2017) menyatakan bahwa, “Saat ini di Bantul ada 33 SKPD, sementara hasil pemetaan sesuai urusan menjadi 36 SKPD, namun dari hasil pembahasan ditingkat pansus menjadi 27 SKPD”. Ia mengatakan perampingan struktur organisasi hingga menjadi 27 SKPD itu karena sesuai hasil pemetaan, urusan pemerintah daerah perlu melakukan penggabungan-penggabungan dinas yang terkait demi efisiensi. Salah satu semangat dari pembentukan SKPD ini adalah semangat untuk melakukan efisiensi dengan membentuk

organisasi pemerintah yang ramping, efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera maka pemerintah diharuskan memiliki kinerja yang baik, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja. Komitmen organisasi diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak dan mengutamakan kepentingan organisasinya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Adanya komitmen organisasi dalam pemerintah akan meningkatkan tanggung jawab manajerial dalam mencapai tujuan pemerintah.

Pergantian sistem ke desentralisasi menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dana publik kepada masyarakat atau disebut akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban dari proses awal hingga pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik. Adanya akuntabilitas publik, maka publik akan dapat mengetahui penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat tersebut (Hazmi dkk, 2012). Oleh karena itu, manajerial akan bertanggung jawab dan berusaha untuk melakukan perencanaan yang lebih baik dengan cara selalu meningkatkan kinerja manajerialnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen guna menyediakan keyakinan memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang ada, dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang andal. Apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Partisipasi anggaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada pemerintah karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dengan manajer tingkat menengah dalam proses penyusunan anggaran. Oleh karena itu, manajer pada tingkat menengah dan tingkat bawah akan berusaha untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan memiliki tanggung jawab yang tinggi supaya tujuan dalam penyusunan anggaran dapat mudah tercapai.

Kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jelas dan spesifik suatu sasaran anggaran ditetapkan, dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas maka manajerial akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan lebih bertanggung jawab supaya tujuan sasaran anggaran dapat dengan mudah tercapai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putri (2013), "Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPI) terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi

Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen berupa Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran. Perbedaan selanjutnya yaitu perubahan objek penelitian yang akan dilakukan di SKPD Kabupaten Bantul pada tahun 2017. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
4. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teori *stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan pemilik dan kesuksesan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, pemerintah selaku *steward* memiliki fungsi pengelolaan sumber daya dan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Komitmen organisasi merupakan suatu situasi sejauh mana karyawan dapat memihak atau mengutamakan organisasi dan keinginan dalam mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Sulistiyani 2010). Penelitian-penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja telah dilakukan oleh Kurniawan (2013), Wulandari (2013) dan Putri (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Pegawai yang

mempunyai komitmen yang tinggi akan bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi karena menganggap kepentingan organisasi sebagai prioritas dibandingkan dengan kepentingan individu pegawai. Selain itu pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan dan keterampilan dengan semangat ketika bekerja seperti menggunakan informasi yang dimilikinya untuk menyusun anggaran dengan jelas agar dapat meminimalisir adanya kesenjangan anggaran. Apabila manajer dapat meminimalisir kesenjangan anggaran maka tujuan pemerintah dapat mudah tercapai. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Akuntabilitas publik adalah suatu prinsip pertanggungjawaban kepada publik, pertanggungjawaban kepada publik ini dimulai dari proses awal hingga terlaksanakannya suatu kegiatan. Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial yang telah dilakukan oleh Astini (2014), Hazmi (2012), dan Putra (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif pada kinerja manajerial. Adanya akuntabilitas publik akan membuat masyarakat mengetahui tentang program atau kegiatan pemerintah yang dianggarkan dan dilaksanakan. Maka masyarakat dapat membandingkan bagaimanakah kinerja pemerintah dilihat dari program/kegiatan yang dianggarkan dengan program/kegiatan yang sudah terlaksana. Bila kinerja pemerintah dinilai baik oleh masyarakat maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Dengan adanya kepercayaan yang didapatkan dari masyarakat maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya. Hal ini pula akan memacu manajer untuk lebih bertanggung jawab dalam penyajian dan pelaporan penggunaan dana publik serta terlaksananya program atau kegiatan yang dianggarkan. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang dilakukan menyeluruh pada lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2013), Rosdiana (2010), dan Putri (2013) menyatakan bahwa sistem internal pengendalian pemerintah berpengaruh positif pada kinerja manajerial. Komponen dalam SPIP berupa prosedur dan kebijakan akan menyakinkan adanya kepastian telah tercapainya sasaran serta tujuan organisasi, sehingga ketika tujuan dan sasaran telah tercapai maka dengan demikian dapat meningkatkan kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Partisipasi anggaran adalah keikutsertaan, keterlibatan dan pengaruh manajer tingkat bawahan dan tingkat menengah dalam proses penyusunan anggaran (Chong et.al, 2002). Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial yang telah dilakukan oleh Nengsy, dkk (2013), Sari, dkk (2014), dan Yanida, dkk (2013) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja manajerial. Partisipasi anggaran adalah keikutsertaan, keterlibatan dan pengaruh manajer tingkat bawahan dan tingkat menengah dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dalam pemerintah akan sangat penting bagi para manajer karena manajer akan merasa produktif, dihargai dan merasa puas terhadap pekerjaannya sehingga akan mendorong meningkatnya kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas dengan tujuan supaya anggaran mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Penelitian mengenai pengaruh kejelasan

sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial yang telah dilakukan oleh Sari, dkk (2014), Putri (2013) dan Hazmi, dkk (2012) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas dengan tujuan supaya anggaran mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dengan tujuan dan sasaran anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik maka manajer akan mudah untuk memahami dan mengerti anggaran, sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan lebih bertanggung jawab dan pada akhirnya tujuan pemerintah mudah tercapai. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian dan Jenis Data

Obyek penelitian merupakan lokasi/tempat dilakukannya suatu penelitian. Penelitian ini sendiri dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu pejabat pemerintah pada dinas dan badan SKPD Kabupaten Bantul yang meliputi kepala bidang/bagian, tingkat kepala, dan kepala subbidang/subbagian. Penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner, data primer yaitu jenis data yang di dapatkan langsung dari sumbernya. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner di SKPD Kabupaten Bantul.

Teknik Pengambilan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* dengan kriteria-kriteria dalam penelitian ini yaitu pejabat pemerintah yang terdiri dari kepala bidang/bagian, tingkat kepala, serta kepala subbidang/subbagian dari badan dan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diserahkan langsung pada narasumber dengan disertai surat izin penelitian dan surat permohonan pengisian kuesioner.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kinerja manajerial SKPD (Y)

Variabel kinerja manajerial pada dapat diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuisoner yang digunakan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Putri (2013) dengan

8 indikator pernyataan berkaitan dengan perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan.

Komitmen Organisasi (X1)

Variabel komitmen organisasi pada SKPD dapat diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuesioner yang digunakan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Putri (2013). Kuesioner ini terdiri dari tujuh butir pertanyaan mengenai komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normatif.

Akuntabilitas Publik (X2)

Variabel akuntabilitas publik pada SKPD dapat diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuisoner yang digunakan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Putra (2013). Kuesioner ini terdiri dari atas sembilan pertanyaan yang berkaitan dengan akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas hukum.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)

Variabel sistem pengendalian internal pemerintah pada SKPD dapat diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuisoner yang digunakan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Putri (2013). Kuesioner ini terdiri dari atas dua puluh butir pertanyaan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi.

Partisipasi Anggaran (X4)

Variabel partisipasi anggaran pada SKPD dapat diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuisoner menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Haryadi (2012). Kuesioner ini terdiri dari atas lima pernyataan mengenai keterlibatan dan pengaruh terhadap anggaran.

Kejelasan Sasaran Anggaran (X5)

Variabel kejelasan sasaran anggaran pada SKPD dapat diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuisoner menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Putra (2013). Kuesioner ini terdiri dari atas tujuh pernyataan mengenai tujuan, kinerja, sasaran, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, koordinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode *purposive sampling* yang digunakan, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 responden yang memenuhi kriteria.

TABEL 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Dasar Klasifikasi	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	110
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	14
3	Jumlah kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap	7
4	Jumlah kuesioner yang kembali namun tidak memenuhi kriteria responden	9
5	Jumlah kuesioner yang dianalisis	80
<i>Usable Response Rate</i>		72,72%

Sumber: Microsoft Excel *versi* 2010

Diolah kembali oleh peneliti

Uji Statistik Deskriptif

TABEL 4.3
Uji statistik Deskriptif

	N	Kisaran teoritis			Kisaran aktual			Std. Deviation
		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	
Kinerja Manajerial	80	8	40	24	20	36	29,95	3,174
Komitmen Organisasi	80	7	35	21	17	33	26,03	3,522
Akuntabilitas Publik	80	9	45	27	27	42	39,25	2,462
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	80	20	100	60	68	95	81,49	5,544
Partisipasi Anggaran	80	5	25	15	14	22	18,08	1,799
Kejelasan Sasaran Anggaran	80	7	35	21	18	32	27,29	2,734

Sumber: Output SPSS *versi* 17

Diolah kembali oleh Peneliti

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif tersebut ditunjukkan bahwa jumlah data masing-masing variabel adalah 80 data. Adapun hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti memiliki mean aktual yang lebih tinggi dibanding dengan mean teoritis yang menunjukkan bahwa variabel yang diteliti telah diterapkan dengan cukup baik.

Uji Kualitas Instrumen dan Data

Uji Validitas

Tabel 4. 5.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	Signifikan	Kesimpulan	
Kinerja Manajerial	KM1	0,473	0,2199	Valid	
	KM2	0,443	0,2199	Valid	
	KM3	0,594	0,2199	Valid	
	KM4	0,615	0,2199	Valid	
	KM5	0,444	0,2199	Valid	
	KM6	0,554	0,2199	Valid	
	KM7	0,472	0,2199	Valid	
	KM8	0,610	0,2199	Valid	
Komitmen Organisasi	KO1	0,783	0,2199	Valid	
	KO2	0,706	0,2199	Valid	
	KO3	0,731	0,2199	Valid	
	KO4	0,636	0,2199	Valid	
	KO5	0,665	0,2199	Valid	
	KO6	0,722	0,2199	Valid	
	KO7	0,651	0,2199	Valid	
Akuntabilitas Publik	AP1	0,458	0,2199	Valid	
	AP2	0,640	0,2199	Valid	
	AP3	0,421	0,2199	Valid	
	AP4	0,383	0,2199	Valid	
	AP5	0,389	0,2199	Valid	
	AP6	0,489	0,2199	Valid	
	AP7	0,544	0,2199	Valid	
	AP8	0,567	0,2199	Valid	
	AP9	0,257	0,2199	Valid	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	SPIP1	0,610	0,2199	Valid	
	SPIP2	0,284	0,2199	Valid	
	SPIP3	0,651	0,2199	Valid	
	SPIP4	0,587	0,2199	Valid	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	SPIP5	0,263	0,2199	Valid	
	SPIP6	0,399	0,2199	Valid	
	SPIP7	0,319	0,2199	Valid	
	SPIP8	0,511	0,2199	Valid	
	SPIP9	0,287	0,2199	Valid	
	SPIP10	0,567	0,2199	Valid	
	SPIP11	0,461	0,2199	Valid	
	SPIP12	0,603	0,2199	Valid	
	SPIP13	0,430	0,2199	Valid	
	SPIP14	0,256	0,2199	Valid	
	SPIP15	0,238	0,2199	Valid	
	SPIP16	0,313	0,2199	Valid	
	SPIP17	0,294	0,2199	Valid	
	SPIP18	0,362	0,2199	Valid	
	SPIP19	0,304	0,2199	Valid	
	SPIP20	0,283	0,2199	Valid	
	Partisipasi Anggaran	PA1	0,444	0,2199	Valid
		PA2	0,474	0,2199	Valid
		PA3	0,389	0,2199	Valid
		PA4	0,414	0,2199	Valid
PA5		0,487	0,2199	Valid	
Kejelasan Sasaran Anggaran	KSA1	0,565	0,2199	Valid	
	KSA2	0,554	0,2199	Valid	
	KSA3	0,703	0,2199	Valid	
	KSA4	0,481	0,2199	Valid	
	KSA5	0,486	0,2199	Valid	
	KSA6	0,463	0,2199	Valid	
	KSA7	0,556	0,2199	Valid	

Sumber: Output SPSS versi 17
Diolah kembali oleh peneliti

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas di atas menunjukkan bahwa seluruh butir-butir pertanyaan valid. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan *pearson correlation* mendapatkan hasil bahwa seluruh butir pertanyaan dari semua variabel adalah valid. Seluruh variabel yang di analisis dinyatakan valid karena masing-masing butir pernyataan memiliki nilai *r* hitung > nilai *r* tabel sebesar 0,2199.

Uji Reliabilitas

TABEL 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kinerja Manajerial	0,717	Reliabilitas Tinggi
2	Komitmen Organisasi	0,774	Reliabilitas Tinggi
3	Akuntabilitas Publik	0,707	Reliabilitas Tinggi
4	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,690	Reliabilitas Moderat
5	Partisipasi Anggaran	0,591	Reliabilitas Moderat
6	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,720	Reliabilitas Tinggi

Sumber: Output SPSS *versi 17*
Diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan pada table 4.9 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel yang diuji reliable. Variabel kinerja manajerial, komitmen organisasi, akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran memiliki reliabilitas tinggi karena memiliki *cronbach alpha* 0,70-0,90, selanjutnya variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi anggaran memiliki nilai *cronbach alpha* 0,50-0,70 sehingga memiliki reliabilitas moderat.

Uji Asumsi Klasik.

Uji Normalitas

Tabel 4.7.
Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.080	80	.200*	.980	80	.239

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa nilai Sig yaitu sebesar $0,200 > \alpha (0,05)$, karena nilai sig lebih besar dari alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.8.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Komitmen Organisasi	0,958	1,044	Tidak terjadi multikolinieritas
Akuntabilitas Publik	0,973	1,028	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,837	1,195	Tidak terjadi multikolinieritas
Partisipasi Anggaran	0,961	1,040	Tidak terjadi multikolinieritas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,816	1,226	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output SPSS *versi 17*
Diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan tabel Hasil 4.8 Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF < 10 , dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heterkodastisitas

Tabel 4.9.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Komitmen Organisasi	0,232	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Akuntabilitas Publik	0,359	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,385	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Partisipasi Anggaran	0,361	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,916	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS *versi 17*
Diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai sig > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada masing-masing variabel independen.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan yang dilihat dari nilai koefisien determinasi Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4. 11.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.473 ^a	.224	.171	2.889	2.085

a. Predictors: (Constant), KSA, SPIP, KO, PA, AP

b. Dependent Variable: KM

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan table 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,171 yang dapat diartikan bahwa 17,1% variabel kinerja kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh variabel komitmen organisasi, akuntabilitas publik, sistem pengendalian internal pemerintah, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan 82,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

Uji Koefisien Simultan (Uji-F)

Pengujian koefisien simultan Uji Koefisien Simultan (Uji-F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan kriteria nilai sig < 0,05. Hasil uji dari uji Koefisien Simultan (Uji-F) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12.

Hasil Uji Koefisien Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	178.144	5	35.629	4.269	.002 ^a
Residual	617.656	74	8.347		
Total	795.800	79			

a. Predictors: (Constant), KSA, SPIP, KO, PA, AP

b. Dependent Variable: KM

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Simultan dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,002 < 0,05$, artinya komitmen organisasi, akuntabilitas publik, sistem pengendalian internal pemerintah, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Bantul.

Uji Koefisien Parsial (Uji-t)**Tabel 4. 10.**

Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	13.429	9.162		1.466	.147	
1	KO	.331	.094	.367	3.512	.001
	AP	-.085	.144	-.066	-.586	.560
	SPIP	-.049	.059	-.086	-.830	.409
	PA	.388	.238	.171	1.633	.107
	KSA	.279	.132	.240	2.119	.037

Sumber: Output SPSS *versi 17*

Diolah kembali oleh peneliti

PEMBAHASAN**Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pertama dengan nilai $\text{sig } 0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,331, yang menunjukkan komitmen organisasi **berpengaruh** terhadap kinerja manajerial SKPD Bantul, artinya semakin kuat komitmen organisasi pegawai maka akan meningkatkan kinerja. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Kurniawan (2013), Wulandari (2013) dan Putri (2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja, menurutnya pegawai memiliki kinerja yang baik apabila memiliki komitmen organisasi yang tinggi dan pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengaruh Akutabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis kedua dengan $\text{sig } 0,560 > \alpha 0,05$, dan nilai koefisien regresi -0,085, yang menunjukkan Akutabilitas Publik **tidak berpengaruh** terhadap kinerja manajerial SKPD Bantul. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Amril (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, hal ini berarti bahwa sistem akuntabilitas publik di SKPD Kabupaten Bantul masih lemah atau belum di jalankan dengan baik sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah, lemahnya akuntabilitas publik diduga disebabkan karena adanya penataan SKPD baru yang menyebabkan beberapa personil mengalami mutasi maupun promosi sehingga masih perlu adanya pendampingan dan *refreshing* pengetahuan terkait dengan akuntabilitas kinerja. Selain itu masih adanya SKPD maupun kecamatan yang belum melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dijadwalkan sehingga pelaksanaan dan pelaporannya pun mengalami keterlambatan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis ketiga dengan nilai $\text{sig } 0,409 > \alpha 0,05$, dan nilai koefisien regresi sebesar -0,049, yang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) **tidak berpengaruh** terhadap kinerja manajerial SKPD Bantul. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Narsih (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh pada kinerja manajerial

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal pemerintah di SKPD Kabupaten Bantul masih lemah atau belum di jalankan dengan baik sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah. Kelemahan sistem pengendalian internal biasanya disebabkan karena pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan serta belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dugaan lainnya yaitu belum terintegrasinya sistem dan aplikasi yang dibangun di SKPD Kabupaten Bantul. Sistem dan aplikasi ini meliputi sistem informasi, sistem perencanaan dan sistem informasi kinerja yang merupakan unsur-unsur penting dalam pengendalian. Hal ini berdasarkan laporan kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tahun 2017 dan berdasarkan jawaban responden atas pernyataan mengenai sistem pengendalian internal yang menyatakan ketidaksetujuan.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis keempat dengan nilai $\text{sig } 0,107 > \alpha 0,05$, dan nilai koefisien regresi sebesar 0,338, yang menunjukkan Partisipasi Anggaran **tidak berpengaruh** terhadap kinerja manajerial SKPD Bantul. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rafika (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan partisipasi anggaran di SKPD Kabupaten Bantul masih rendah. Rendahnya partisipasi anggaran diduga disebabkan kurangnya keterlibatan dalam penganggaran yang menyebabkan manajer kurang memahami anggaran, merasa kurang produktif sehingga menyebabkan motivasi kinerja manajer rendah sehingga kinerja manajerial SKPD pun rendah. Dugaan lain yaitu aplikasi dan sistem terkait sistem perencanaan belum terintegrasi sehingga menyebabkan masih rendahnya partisipasi anggaran Hal ini berdasarkan laporan kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tahun 2017 dan berdasarkan jawaban responden atas pernyataan mengenai partisipasi anggaran yang menyatakan ketidaksetujuan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis kelima dengan nilai $\text{sig } 0,037 < \alpha 0,05$, dan nilai koefisien regresi sebesar 0,279, yang menunjukkan Kejelasan Sasaran Anggaran **berpengaruh** terhadap kinerja manajerial SKPD Bantul, artinya semakin besar Kejelasan Sasaran Anggaran

yang dibuat, maka kinerja akan semakin meningkatkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hazmi, dkk (2012), Putra (2013) dan Sari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada kinerja manajerial mengenai kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, hal ini berarti bahwa SKPD Kabupaten Bantul sudah memiliki kejelasan sasaran anggaran yang tinggi. Kejelasan sasaran anggaran digunakan untuk menilai kinerja organisasi apakah baik atau buruk secara keuangan serta mendapatkan informasi mengenai kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan organisasi yang akan membantu dalam menentukan tujuan dan sasaran anggaran dengan jelas dan spesifik. Apabila telah ditetapkan secara jelas dan spesifik maka manajer akan mudah untuk memahami dan mengerti anggaran, sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan lebih bertanggung jawab dan pada akhirnya tujuan pemerintah mudah tercapai. Hal ini berdasarkan jawaban responden atas pernyataan kejelasan sasaran anggaran yang menyatakan kesetujuan.

KESIMPULAN

1. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.
2. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.
3. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.
4. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.
5. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.

SARAN

1. Bagi penelitian selanjutnya, selain melakukan pengisian kuesioner sebaiknya juga melakukan wawancara secara langsung terhadap responden pada saat penyebaran kuesioner, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dengan cakupan yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan generalisasi kesimpulan hasil penelitian.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel-variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Herlin Arisanti., 2014, "Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN 1412-4467 Vol. 9 No. 2 Agustus 2010.*
- Adamy, Marhawi. 2010. "Pengaruh Kompensasi, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kota Lhokseumawe". *Jurnal Aplikasi Manajemen.* Vol. 8, No. 4. November 2010.
- Afrida, Nur. 2013. "Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)". *Jurnal Akuntansi.* Ejournal.unp.ac.id.
- Amril, V. N., 2014, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung), *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Astini, Ni Kadek. 2014. "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten Klungkung". *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha.* Vol 2, No 1.
- Azmi, G., & Darwanis, S. A., 2014, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Pemerintah Aceh, *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).
- Baihaqi. 2012 "Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah". *Jurnal Fairness.* Vol 1 No 3 243-253.
- Budiharjo, C. 2008. "Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional terhadap Semangat Kerja Karyawan (Studi pada Balai Latihan Kerjadan Industri Semarang." *Skripsi.* Universitas Diponegoro Semarang.
- Chong, Vincent & Kar Ming Chong. 2002. *Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Peformance, a Structural Equation Modeling Approach.* *Journal of Accounting Research.*

- Donaldson, L., & Davis, J. H., 1991, Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.
- Ekha Yunora Sinaga dan Narumonrang. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi* 48.
- Elwood, Sheila. 1993. “*Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management*”. *Local Government Studies*. Vol 19.
- Ghozali, I. 2011. *Struktural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haryadi. 2012. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hazmi. 2012. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial, Aparatur Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2.
- Indriantoro, Nur, 1993. “*An Empirical Study of Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating Variabels of the Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Irianto, O., 2014. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Budaya Organisasi dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Merauke.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, (2), pp.526-533.
- Kurniawan, Muhammad., 2013, "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci)." *Jurnal Akuntansi* 1.3.
- Laporan Kinerja Sekretariat Kabupaten Bantul tahun 2017
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mowday, et al., 1984. “*The Measurement of Organizational Commitment*.” *Journal of Vocational Behavior*.
- Natalia. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*: Universitas Diponegoro Semarang.
- Nazaruddin, Ietje. dan Agus Tri Basuki. 2017, Analisis Statistik Dengan SPSS, *Danisa Media: Sleman*

- Nengsy H, Sari N. R, dan Agusti Restu. 2013. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Job Relevant Information
- Oktaviana, Manwahani. 2010, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Publik dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008.
- Putra, Deki. 2013. “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah”. *Jurnal Akuntansi*. Ejournal.unp.ac.id.
- Putri, G Yolanda, 2013. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)”. *Jurnal Akuntansi*. Ejournal.unp.ac.id.
- Putri, N Dewinda. 2010. “Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Kabupaten Tegal)”. Eprints.undip.ac.id.
- QS. At Taubah: 5
- Rafika, Anggraeni. 2014. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu”. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Rahayu, Wiji Sri. 2008, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi”, *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sari, D. P. I Permata, Sinarwati, Ni Kadek, dan Sujana Edy. 2014. “Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)”. *Ejournal S1 Ak universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2, No.1.
- Sari, R Nabila. 2015. “Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar). Ejournal.unp.ac.id.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Teori, Kosep, Aplikasi)*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Vonny Nofisa Amril. 2009. Pengaruh Akuntabilitas publik, Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. *Tesis*. Universitas Negeri Padang

Wulandari, Narti. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pegawai Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. *Jurnal Akuntansi*.

Yanida, Maria, dkk. 2013. "Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma jamal*. Volume 4 Nomor 3.